



Lampiran I: Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Deli Serdang tentang Standar Operasional Prosedur Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko melalui OSS-RBA Kabupaten Deli Serdang  
 Nomor : 500.16.7/0100/DPMPTSP-DS/2025  
 Tanggal : 6 Januari 2025

  <b>DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN DELI SERDANG</b>	NOMOR SOP	: SOP/XV/C01/DPMPTSP/2025
	TGL. PEMBUATAN	: 6 Januari 2025
	TGL. REVISI	:
	TGL. EFEKTIF	: 6 Januari 2025
	DISAHKAN OLEH	
	NAMA SOP	: Penerbitan Izin Usaha Koperasi Simpan Pinjam / Unit Simpan Pinjam
<b>DASAR HUKUM:</b>	<b>KUALIFIKASI PELAKSANA:</b>	
1 Undang-Undang nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik	1 Memahami dasar hukum dan persyaratan perizinan	
2 Undang-undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti undang-undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi undang-undang	2 Mampu mengoperasikan Komputer	
3 Peraturan Pemerintah RI Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah	3 Mampu berkomunikasi dengan baik	
4 Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko	4 Memiliki sikap teliti, disiplin dan jujur	
5 Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2012 Tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan		
6 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah		
7 Peraturan Menteri Koperasi Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2025 tentang Standar Kestisn Usaha pada Penyelenggaraan Perizinan Berbasis Resiko Sektor Perkoperasian		
8 Peraturan Bupati Deli Serdang Nomor 56 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko di Kabupaten Deli Serdang		
9 Peraturan Bupati Deli Serdang Nomor 1 Tahun 2025 Tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur		
<b>KETERKAITAN:</b>	<b>PERALATAN/PERLENGKAPAN:</b>	
	1 Komputer	
	2 Printer	
	3 ATK	
	4 Aplikasi OSS - RBA	
<b>PERINGATAN:</b>	<b>PENCATATAN DAN PENDATAAN:</b>	
Apabila SOP tidak dijalankan dengan baik dan benar maka penerbitan izin tidak akan sesuai dengan waktu yang telah ditentukan	1 Berkas Permohonan	
	2 Surat Perintah Tinjau Lapangan dan Pembentahaan Penolakan	
	3 Riwayat Pelunasan PBB	



Lampiran II : Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Deli Serdang tentang Standar Operasional Prosedur Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko melalui OSS-RBA Kabupaten Deli Serdang  
 Nomor : 500.16.7/0100/DPMPSTP-DS/2025  
 Tanggal : 6 Januari 2025

  <b>DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN DELI SERDANG</b>	NOMOR SOP	: SOP/XVIC02/DPMPSTP/2025
	TGL. PEMBUATAN	: 6 Januari 2025
	TGL. REVISI	:
	TGL. EFEKTIF	: 6 Januari 2025
DISAHKAN OLEH		 Dr. Hendra Wijaya Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Deli Serdang NIP. 29691213 199010 1 002
NAMA SOP		: Penerbitan Sertifikat Standar Usaha Klinik
<b>DASAR HUKUM:</b>		<b>KUALIFIKASI PELAKSANA:</b>
1	Undang-Undang nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik	1 Memahami dasar hukum dan persyaratan perizinan
2	Undang-undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti undang-undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi undang-undang.	2 Mampu mengoperasikan Komputer
3	Undang-undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan adalah aturan omnibus law yang merombak sistem kesehatan Indonesia secara menyeluruh, terdiri dari 20 bab dan 458 pasal. Undang-undang ini fokus pada transformasi kesehatan, penguatan pelayanan dasar, kemudahan akses, serta peningkatan perlindungan bagi tenaga medis dan masyarakat.	3 Mampu berkomunikasi dengan baik
4	Peraturan Pemerintah RI Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah	4 Memiliki sikap teliti, disiplin dan jujur
5	Peraturan Pemerintah RI Nomor 28 Tahun 2024 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan.	
6	Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko	
7	Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2012 Tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan	
8	Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah	
9	Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 17 Tahun 2024 Tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 14 Tahun 2021 Tentang Standar Kegiatan Usaha dan Produk pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Kesehatan Standar Kegiatan Usaha dan Standar Produk/Jasa pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sub Sektor Kesehatan.	
10	Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 11 Tahun 2025 Tentang 2025 Tentang Standar Kegiatan Usaha dan Standar Produk/Jasa pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sub Sektor Kesehatan.	
11	Peraturan Bupati Deli Serdang Nomor 56 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko di Kabupaten Deli Serdang	
<b>KETERKAITAN:</b>		<b>PERALATAN/PERLENGKAPAN:</b>
1	SOP Verifikasi Sertifikat Standar Usaha Klinik	1 Komputer 2 Printer 3 ATK 4 Aplikasi OSS - RBA
<b>PERINGATAN:</b>		<b>PENCATATAN DAN PENDATAAN:</b>
Apabila SOP tidak dijalankan dengan baik dan benar maka penerbitan izin tidak akan sesuai dengan waktu yang telah ditentukan		1 Berkas Permohonan 2 Surat Perintah Tinjau Lapangan dan Pemberitahuan Penolakan 3 Riwayat Pelunasan PBB



Lampiran III : Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu PINTU Kabupaten Deli Serdang tentang Standar Operasional Prosedur Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko melalui OSS-RBA Kabupaten Deli Serdang  
 Nomor : 500.16.7/0100/DPMPSTSP-DS/2025  
 Tanggal : 6 Januari 2025

  <b>DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN DELI SERDANG</b>	NOMOR SOP	: SOP/XVIC03/DPMPSTSP/2025
	TGL. PEMBUATAN	: 6 Januari 2025
	TGL. REVISI	:
	TGL. EFEKTIF	: 6 Januari 2025
	DISAHKAN OLEH	: <div style="text-align: center;">             Drs. Hendra Wijaya            Kepala Dinas            NPTA 591213 199010 1 002         </div>
NAMA SOP	: Penerbitan Izin Standar Apotek	
<b>DASAR HUKUM:</b>	<b>KUALIFIKASI PELAKSANA:</b>	
1 Undang-Undang nomor 25 Tahun 2008 tentang Pelayanan Publik	1 Memahami dasar hukum dan persyaratan perizinan	
2 Undang-undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti undang-undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi undang-undang	2 Mampu mengoperasikan Komputer	
3 Undang-undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan adalah aturan omnibus law yang merombak sistem kesehatan Indonesia secara menyeluruh, terdiri dari 20 bab dan 456 pasal. Undang-undang ini fokus pada transformasi kesehatan, penguatan pelayanan dasar, kemudahan akses, serta peningkatan perlindungan bagi tenaga medis dan masyarakat.	3 Mampu berkomunikasi dengan baik	
4 Peraturan Pemerintah RI Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah	4 Memiliki sikap teliti, disiplin dan jujur	
5 Peraturan Pemerintah RI Nomor 28 Tahun 2024 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan.		
6 Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko		
7 Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2012 Tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan		
8 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah		
9 Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 17 Tahun 2024 Tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 14 Tahun 2021 Tentang Standar Kegiatan Usaha dan Produk pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Kesehatan Standar Kegiatan Usaha dan Standar Produk/Jasa pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sub Sektor Kesehatan.		
10 Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 11 Tahun 2025 Tentang 2025 Tentang Standar Kegiatan Usaha dan Standar Produk/Jasa pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sub Sektor Kesehatan.		
11 Peraturan Bupati Deli Serdang Nomor 56 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko di Kabupaten Deli Serdang		
<b>KETERKAITAN:</b>	<b>PERALATAN/PERLENGKAPAN:</b>	
1 SOP Verifikasi Sertifikat Standar Usaha Apotek	1 Komputer 2 Printer 3 ATK 4 Aplikasi OSS - RBA	
<b>PERINGATAN:</b>	<b>PENCATATAN DAN PENDATAAN:</b>	
Apabila SOP tidak dijalankan dengan baik dan benar maka penerbitan izin tidak akan sesuai dengan waktu yang telah ditentukan	1 Berkas Permohonan 2 Surat Perintah Tinjau Lapangan dan Pembertahuan Penilaian 3 Riwayat Pelunasan PBB	





Lampiran IV : Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Deli Serdang tentang Standar Operasional Prosedur Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko melalui OSS-RBA Kabupaten Deli Serdang  
 Nomor : 500.16.7/0100/DPMP/SP-05/2025  
 Tanggal : 6 Januari 2025

  <b>DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN DELI SERDANG</b>	NOMOR SOP	: SOP/XVIC04/DPMP/SP/2025
	TGL. PEMBUATAN	: 6 Januari 2025
	TGL. REVISI	:
	TGL. EFEKTIF	: 6 Januari 2025
	DISAHKAN OLEH	: <div style="text-align: center;">           Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Deli Serdang          DR. Hendra Wijaya          Pembina Utama Muda          NIP. 19691213 199010 1 002       </div>
NAMA SOP	: Perencanaan dan Pelaksanaan Standar Operasional Prosedur Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Melalui Sistem OSS RBA Kabupaten Deli Serdang	
<b>DASAR HUKUM:</b>	<b>KUALIFIKASI PELAKSANA:</b>	
1 Undang-Undang nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik	1 Memahami dasar hukum dan persyaratan perizinan	
2 Undang-undang Nomor 8 Tahun 2023 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti undang-undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi undang-undang.	2 Mampu mengoperasikan Komputer	
3 Undang-undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan adalah aturan omnibus law yang merombak sistem kesehatan Indonesia secara menyeluruh, terdiri dari 20 bab dan 458 pasal. Undang-undang ini fokus pada transformasi kesehatan, penguatan pelayanan dasar, kemudahan akses, serta peningkatan perlindungan bagi tenaga medis dan masyarakat.	3 Mampu berkomunikasi dengan baik	
4 Peraturan Pemerintah Nomor 86 Tahun 2019 Tentang Keamanan Pangan	4 Memiliki sikap teliti, disiplin dan jujur	
5 Peraturan Pemerintah RI Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah		
6 Peraturan Pemerintah RI Nomor 28 Tahun 2024 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan.		
7 Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko		
8 Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2012 Tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan		
9 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 136 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah		
10 Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 2 Tahun 2023 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2014 tentang Kesehatan Lingkungan		
11 Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 17 Tahun 2024 Tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 14 Tahun 2021 Tentang Standar Kegiatan Usaha dan Produk pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Kesehatan Standar Kegiatan Usaha dan Standar Produk/Jasa pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sub Sektor Kesehatan		
12 Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 11 Tahun 2025 Tentang 2025 Tentang Standar Kegiatan Usaha dan Standar Produk/Jasa pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sub Sektor Kesehatan.		
13 Peraturan Bupati Deli Serdang Nomor 56 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko di Kabupaten Deli Serdang		
14 Peraturan Bupati Deli Serdang Nomor 11 Tahun 2025 Tentang Perubahan atas Peraturan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Deli Serdang Nomor 46 Tahun 2023 Tentang Pembentukan Unit Pelaksanaan Teknis Dinas Kesehatan Kabupaten Deli Serdang		
<b>KETERKAITAN:</b>	<b>PERALATAN/PERLENGKAPAN:</b>	
1 SOP Pemeriksaan Sampel Air dan Makanan	1 Komputer 2 Printer 3 ATK 4 Aplikasi OSS - RBA	
<b>PERINGATAN:</b>	<b>PENCATATAN DAN PENDATAAN:</b>	
Apabila SOP tidak dijalankan dengan baik dan benar maka penerbitan izin tidak akan sesuai dengan waktu yang telah ditentukan	1 Berkas Permohonan 2 Surat Perintah Tinjau Lapangan dan Pemberitahuan Penolakan 3 Riwayat Pelunasan PBB	



Lampiran V : Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Deli Serdang tentang Standar Operasional Prosedur Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko melalui OSS-RBA Kabupaten Deli Serdang  
 Nomor : 500.16.7/0100/DPMPSTSP-OS/2025  
 Tanggal : 6 Januari 2025

  <b>DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN DELI SERDANG</b>	NOMOR SOP	: SOP/KWC05/DPMPSTSP/2025
	TGL PEMBUATAN	: 6 Januari 2025
	TGL REVISI	:
	TGL EFEKTIF	: 6 Januari 2025
	DISAHKAN OLEH	
	NAMA SOP	Peraturan Bupati Deli Serdang tentang Standar Operasional Prosedur Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko
<b>DASAR HUKUM:</b>	<b>KUALIFIKASI PELAKSANA:</b>	
1 Undang-Undang nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik	1 Memahami dasar hukum dan persyaratan perizinan	
2 Undang-undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti undang-undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi undang-undang	2 Mampu mengoperasikan Komputer	
3 Undang-undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan adalah aturan omnibus law yang merombak sistem kesehatan Indonesia secara menyeluruh, terdiri dari 20 bab dan 458 pasal. Undang-undang ini fokus pada transformasi kesehatan, penguatan pelayanan dasar, kemudahan akses, serta peningkatan perlindungan bagi tenaga medis dan masyarakat.	3 Mampu berkomunikasi dengan baik	
4 Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2019 Tentang Keamanan Pangan	4 Memiliki sikap tektis, disiplin dan jujur	
5 Peraturan Pemerintah RI Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah		
6 Peraturan Pemerintah RI Nomor 28 Tahun 2024 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan.		
7 Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko		
8 Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2012 Tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan		
9 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah		
10 Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 2 Tahun 2023 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2014 tentang Kesehatan Lingkungan		
11 Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 17 Tahun 2024 Tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 14 Tahun 2021 Tentang Standar Kegiatan Usaha dan Produk pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Kesehatan Standar Kegiatan Usaha dan Standar Produk/Jasa pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sub Sektor Kesehatan.		
12 Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 11 Tahun 2025 Tentang 2025 Tentang Standar Kegiatan Usaha dan Standar Produk/Jasa pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sub Sektor Kesehatan.		
13 Peraturan Bupati Deli Serdang Nomor 56 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko di Kabupaten Deli Serdang		
14 Peraturan Bupati Deli Serdang Nomor 11 Tahun 2025 Tentang Perubahan atas Peraturan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Deli Serdang Nomor 46 Tahun 2023 Tentang Pembentukan Unit Pelaksanaan Teknis Dinas Kesehatan Kabupaten Deli Serdang		
<b>KETERKAITAN:</b>	<b>PERALATAN/PERLENGKAPAN:</b>	
1 SOP Verifikasi Sertifikat Laki Sehat	1 Komputer 2 Printer 3 ATK 4 Aplikasi OSS - RBA	
<b>PERINGATAN:</b>	<b>PENCATATAN DAN PENDATAAN:</b>	
Apebila SOP tidak dijalankan dengan baik dan benar maka penerbitan izin tidak akan sesuai dengan waktu yang telah ditentukan	1 Berkas Permohonan 2 Surat Perintah Tinjau Lapangan dan Pembertahuan Penilaian 3 Riwayat Pelunasan PBB	



Lampiran VI : Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Deli Serdang tentang Standar Operasional Prosedur Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko melalui OSS-RBA Kabupaten Deli Serdang  
 Nomor : 500.16.7/0109/DPMPTSP-OSI/2025  
 Tanggal : 6 Januari 2025

  <b>DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN DELI SERDANG</b>	NOMOR SOP	: SOP/XVIC06/DPMPTSP/2025
	TGL. PEMBUATAN	: 6 Januari 2025
	TGL. REVISI	:
	TGL. EFEKTIF	: 6 Januari 2025
	DISAHKAN OLEH	 Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Deli Serdang Drs. Hendra Wibawa Pembina Utama Muda NIP. 19691213 199010 1 002
NAMA SOP		Peraturan Labeling Pembinaan Higiene Sanitasi Pangan (HSP)
<b>DASAR HUKUM:</b>		<b>KUALIFIKASI PELAKSANA:</b>
1	Undang-Undang nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik	1 Memahami dasar hukum dan persyaratan permohonan
2	Undang-undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti undang-undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi undang-undang.	2 Mampu mengoperasikan Komputer
3	Undang-undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan adalah aturan omnibus law yang merombak sistem kesehatan Indonesia secara menyeluruh, terdiri dari 20 bab dan 458 pasal. Undang-undang ini fokus pada transformasi kesehatan, penguatan pelayanan dasar, kemudahan akses, serta peningkatan perlindungan bagi tenaga medis dan masyarakat.	3 Mampu berkomunikasi dengan baik
4	Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2019 Tentang Keamanan Pangan	4 Memiliki sikap teliti, disiplin dan jujur
5	Peraturan Pemerintah RI Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah	
6	Peraturan Pemerintah RI Nomor 24 Tahun 2024 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan.	
7	Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko	
8	Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2012 Tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan	
9	Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah	
10	Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 2 Tahun 2023 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2014 tentang Kesehatan Lingkungan	
11	Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 17 Tahun 2024 Tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 14 Tahun 2021 Tentang Standar Kegiatan Usaha dan Produk pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Kesehatan Standar Kegiatan Usaha dan Standar Produk/Jasa pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sub Sektor Kesehatan.	
12	Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 11 Tahun 2025 Tentang 2025 Tentang Standar Kegiatan Usaha dan Standar Produk/Jasa pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sub Sektor Kesehatan.	
13	Peraturan Bupati Deli Serdang Nomor 56 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko di Kabupaten Deli Serdang	
14	Peraturan Bupati Deli Serdang Nomor 11 Tahun 2025 Tentang Perubahan atas Peraturan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Deli Serdang Nomor 46 Tahun 2023 Tentang Pembentukan Unit Pelaksanaan Teknis Dinas Kesehatan Kabupaten Deli Serdang	
<b>KETERKAITAN:</b>		<b>PERALATAN/PERLENGKAPAN:</b>
1 SOP Verifikasi Labeling Pembinaan Higiene Sanitasi Pangan		1 Komputer 2 Printer 3 ATK 4 Aplikasi OSS - RBA
<b>PERINGATAN:</b>		<b>PENCATATAN DAN PENDATAAN:</b>
Apabila SOP tidak dijalankan dengan baik dan benar maka penerbitan izin tidak akan sesuai dengan waktu yang telah ditentukan		1 Berkas Permohonan 2 Surat Perintah Tinjau Lapangan dan Pembertantuan Penolakan 3 Rwayat Pelunasan PBB



Lampiran VII : Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Deli Serdang tentang Standar Operasional Prosedur Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko melalui OSS-RBA Kabupaten Deli Serdang  
 Nomor : 500.16.7/0100/DPMPSTP-DS/2025  
 Tanggal : 6 Januari 2025

 <p style="text-align: center;"><b>DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN DELI SERDANG</b></p>	NOMOR SOP	: SOP/XV/C07/DPMPSTP/2025
	TGL. PEMBUATAN	: 6 Januari 2025
TGL REVISI	:	
TGL EFEKTIF	: 6 Januari 2025	
DISAHKAN OLEH	 <p style="text-align: right;">Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Deli Serdang  <b>Drs. Hendra Wijaya</b>        Pembina Utama Muda        NIP. 19691213 199010 1 002</p>	
<b>DASAR HUKUM:</b>	<b>NAMA SOP</b>	
<ol style="list-style-type: none"> <li>1 Undang-Undang nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik</li> <li>2 Undang-undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti undang-undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi undang-undang.</li> <li>3 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah</li> <li>4 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko</li> <li>5 Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 24 Tahun 2016 tentang Persyaratan Teknis Bangunan dan Prasarana Rumah Sakit</li> <li>6 Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Klasifikasi dan Perizinan Rumah Sakit</li> <li>7 Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2012 Tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan</li> <li>8 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah</li> <li>9 Peraturan Bupati Deli Serdang Nomor 56 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko di Kabupaten Deli Serdang.</li> </ol>	<b>KUALIFIKASI PELAKSANA:</b>	
<b>KETERKAITAN:</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1 Memahami dasar hukum dan persyaratan perizinan</li> <li>2 Mampu mengoperasikan Komputer</li> <li>3 Mampu berkomunikasi dengan baik</li> <li>4 Memiliki sikap teliti, disiplin dan jujur</li> </ol>	
<ol style="list-style-type: none"> <li>1 SOP Verifikasi Sertifikat Standar</li> </ol>	<b>PERALATAN/PERLENGKAPAN:</b>	
<b>PERINGATAN:</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1 Komputer</li> <li>2 Printer</li> <li>3 ATK</li> <li>4 Aplikasi OSS - RBA</li> </ol>	
<p>Apabila SOP tidak dijalankan dengan baik dan benar maka penerbitan izin tidak akan sesuai dengan waktu yang telah ditentukan</p>	<b>PENCATATAN DAN PENDATAAN:</b>	
	<ol style="list-style-type: none"> <li>1 Berkas Permohonan</li> <li>2 Surat Perintah Tirjau Lapangan dan Pemberitahuan Penolakan</li> <li>3 Riwayat Pelunasan PBB</li> </ol>	



Lampiran VIII : Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Deli Serdang tentang Standar Operasional Prosedur Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko melalui OSS-RBA Kabupaten Deli Serdang  
 Nomor : 500.16.7/0100/DPMPSTP-DS/2025  
 Tanggal : 6 Januari 2025

  <b>DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN DELI SERDANG</b>	NOMOR SOP	: SOP/XV/C08/DPMPSTP/2025	
	TGL. PEMBUATAN	: 6 Januari 2025	
TGL. REVISI	:	TGL. EFEKTIF	: 6 Januari 2025
DISAHKAN OLEH			
	NAMA SOP	: Perizinan Surat Keterangan Pengecer Minuman Beralkohol Golongan B (SKP-B) / Surat Keterangan Pengecer Minuman Beralkohol Golongan C (SKP-C)	
<b>DASAR HUKUM:</b> 1 Undang-Undang nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik 2 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan 3 Undang-undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti undang-undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi undang-undang. 4 Peraturan Pemerintah Ri Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah 5 Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Perdagangan 6 Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko 7 Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2012 Tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan 8 Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 20/M-DAG/PER/4/2014 tentang Pengendalian dan Pengawasan Terhadap Pengadaan, Peredaran dan Penjualan Minuman Beralkohol 9 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah 10 Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 33 Tahun 2025 tentang Standar Kegiatan Usaha dan/atau Standar Produk/Jasa pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Perdagangan dan Metrologi Legal 11 Peraturan Bupati Deli Serdang Nomor 56 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko di Kabupaten Deli Serdang 12 Peraturan Bupati Deli Serdang Nomor 1 Tahun 2025 Tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur	<b>KUALIFIKASI PELAKSANA:</b> 1 Memahami dasar hukum dan persyaratan perizinan 2 Mampu mengoperasikan Komputer 3 Mampu berkomunikasi dengan baik 4 Memiliki sikap teliti, disiplin dan jujur		
<b>KETERKAITAN:</b> 1 SOP Verifikasi Izin Perdagangan Eceran Minuman Beralkohol Golongan B&C	<b>PERALATAN/PERLENGKAPAN:</b> 1 Komputer 2 Printer 3 ATK 4 Aplikasi OSS - RBA		
<b>PERINGATAN:</b> Apabila SOP tidak dijalankan dengan baik dan benar maka penerbitan izin tidak akan sesuai dengan waktu yang telah ditentukan	<b>PENCATATAN DAN PENDATAAN:</b> 1 Berkas Permohonan 2 Surat Perintah Tinjau Lapangan dan Pemberitahuan Penolakan 3 Riwayat Pelunasan PBB		



Lampiran IX : Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Deli Serdang tentang Standar Operasional Prosedur Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko melalui OSS-RBA Kabupaten Deli Serdang  
 Nomor : 500.16.7/0100/DPMPSTP-DS/2025  
 Tanggal : 6 Januari 2025

  <b>DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN DELI SERDANG</b>	NOMOR SOP	: SOP/XV/C09/DPMPSTP/2025
	TGL. PEMBUATAN	: 6 Januari 2025
	TGL. REVISI	:
	TGL. EFEKTIF	: 6 Januari 2025
	DISAHKAN OLEH	: <div style="text-align: right;">             Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Deli Serdang            Drs. Hendra Wijaya            Pembina Utama Muda            NIP. 19691213 199010 1 002         </div>
	NAMA SOP	: Pembelian Tanda Daftar Gudang (TDG)
<b>DASAR HUKUM:</b>		<b>KUALIFIKASI PELAKSANA:</b>
1	Undang-Undang nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik	1 Memahami dasar hukum dan persyaratan perizinan
2	Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan	2 Mampu mengoperasikan Komputer
3	Undang-undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti undang-undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi undang-undang.	3 Mampu berkomunikasi dengan baik
4	Peraturan Pemerintah RI Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah	4 Memiliki sikap teliti, disiplin dan jujur
5	Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Perdagangan	
6	Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko	
7	Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2012 Tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan	
8	Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah	
9	Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 33 Tahun 2025 tentang Standar Kegiatan Usaha dan/atau Standar Produk/Jasa pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Perdagangan dan Metrologi Legal.	
10	Peraturan Bupati Deli Serdang Nomor 56 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko di Kabupaten Deli Serdang	
11	Peraturan Bupati Deli Serdang Nomor 1 Tahun 2025 Tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur	
<b>KETERKAITAN:</b>		<b>PERALATAN/PERLENGKAPAN:</b>
1	SOP Verifikasi Tanda Daftar Gudang (TDG)	1 Komputer 2 Printer 3 ATK 4 Aplikasi OSS - RBA
<b>PERINGATAN:</b>		<b>PENCATATAN DAN PENDATAAN:</b>
Apabila SOP tidak dijalankan dengan baik dan benar maka penerbitan izin tidak akan sesuai dengan waktu yang telah ditentukan		1 Berkas Permohonan 2 Surat Perintah Tinjau Lapangan dan Pemberitahuan Penolakan 3 Riwayat Pelunasan PBB



Lampiran X Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Deli Serdang tentang Standar Operasional Prosedur Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko melalui OSS-RBA Kabupaten Deli Serdang  
 Nomor 500.16.7/0100/DPMPTSP-DS/2025  
 Tanggal 6 Januari 2025

  <b>DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN DELI SERDANG</b>	NOMOR SOP	SOP/XVIC10/DPMPTSP/2025
	TGL PEMBUATAN	6 Januari 2025
	TGL REVISI	
	TGL EFEKTIF	6 Januari 2025
	DISAHKAN OLEH	 Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Deli Serdang Drs. Hendra Wijaya Pembina Utama Muda 19691213 199010 1 002
	NAMA SOP	Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Menengah Tinggi
<b>DASAR HUKUM:</b>	<b>KUALIFIKASI PELAKSANA:</b>	
1 Undang-Undang nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik	1 Memahami dasar hukum dan persyaratan perizinan	
2 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian	2 Mampu mengoperasikan Komputer	
3 Undang-undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti undang-undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi undang-undang.	3 Mampu berkomunikasi dengan baik	
4 Peraturan Pemerintah RI Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah	4 Memiliki sikap teliti, disiplin dan jujur	
5 Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Perindustrian sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2023		
6 Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko		
7 Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 37 Tahun 2025 tentang Standar Kegiatan Usaha dan/atau Standar Produk/Jasa pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Perindustrian		
8 Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2012 Tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan		
9 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah		
10 Peraturan Menteri Perindustrian No. 13 Tahun 2025 tentang Tata Cara Penyampaian Data Industri, Data Kawasan Industri, Data Lain, Informasi Industri, dan Informasi Lain Melalui Sistem Informasi Industri Nasional.		
11 Peraturan Bupati Deli Serdang Nomor 56 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko di Kabupaten Deli Serdang		
12 Peraturan Bupati Deli Serdang Nomor 1 Tahun 2025 Tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur		
<b>KETERKAITAN:</b>	<b>PERALATAN/PERLENGKAPAN:</b>	
1 SOP Verifikasi Izin/Sertifikat standar Sektor Industri (Resiko Menengah Tinggi dan Tinggi)	1 Komputer 2 Printer 3 ATK 4 Aplikasi OSS - RBA	
<b>PERINGATAN:</b>	<b>PENCATATAN DAN PENDATAAN:</b>	
Apabila SOP tidak dijalankan dengan baik dan benar maka penerbitan izin tidak akan sesuai dengan waktu yang telah ditentukan	1 Berkas Pemohonan 2 Surat Perintah Tinjau Lapangan dan Pemberitahuan Penolakan 3 Riwayat Pelunasan PBB	



Lampiran XI : Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Deli Serdang tentang Standar Operasional Prosedur Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko melalui OSS-RBA Kabupaten Deli Serdang  
 Nomor : 500.16.7/0100/DPMPSTSP-DS/2025  
 Tanggal : 6 Januari 2025

  <b>DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN DELI SERDANG</b>	NOMOR SOP	: SOP/KVC11/DPMPSTSP/2025
	TGL. PEMBUATAN	: 6 Januari 2025
	TGL. REVISI	:
	TGL. EFEKTIF	: 6 Januari 2025
	DISAHKAN OLEH	 Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Deli Serdang Drs. Hendra Wijaya Pembina Utama Muda 19691213 199010 1 002 Pejabat Sosial Keperangan Penjual Langsung Minuman Beralkohol Golongan B&C (SKPL B&C)
	NAMA SOP	Penjualan Sosial Keperangan Penjual Langsung Minuman Beralkohol Golongan B&C (SKPL B&C)
<b>DASAR HUKUM:</b>		<b>KUALIFIKASI PELAKSANA:</b>
1	Undang-Undang nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik	1 Memahami dasar hukum dan persyaratan perizinan
2	Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan	2 Mampu mengoperasikan Komputer
3	Undang-undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti undang-undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi undang-undang.	3 Mampu berkomunikasi dengan baik
4	Peraturan Pemerintah RI Nomor 8 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah	4 Memiliki sikap teliti, disiplin dan jujur
5	Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Perdagangan	
6	Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko	
7	Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2012 Tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan	
8	Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 20/M-DAG/PER/4/2014 tentang Pengendalian dan Pengawasan Terhadap Pengadaan, Peredaran dan Penjualan Minuman Beralkohol	
9	Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah	
10	Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 33 Tahun 2025 tentang Standar Kegiatan Usaha dan/atau Standar Produk/Jasa pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Perdagangan dan Metrologi Legal.	
11	Peraturan Bupati Deli Serdang Nomor 56 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko di Kabupaten Deli Serdang	
12	Peraturan Bupati Deli Serdang Nomor 1 Tahun 2025 Tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur	
<b>KETERKAITAN:</b>		<b>PERALATAN/PERLENGKAPAN:</b>
1	SOP Verifikasi Surat Keterangan Penjual Langsung Minuman Beralkohol Golongan B & C (SKPL B&C)	1 Komputer 2 Printer 3 ATK 4 Aplikasi OSS - RBA
<b>PERINGATAN:</b>		<b>PENCATATAN DAN PENDATAAN:</b>
Apabila SOP tidak dijalankan dengan baik dan benar maka penerbitan izin tidak akan sesuai dengan waktu yang telah ditentukan		1 Berkas Permohonan 2 Surat Perintah Tinjau Lapangan dan Pemberitahuan Penolakan 3 Riwayat Pelunasan PBB



Lampiran XII : Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Deli Serdang tentang Standar Operasional Prosedur Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko melalui OSS-RBA Kabupaten Deli Serdang  
 Nomor : 500.16.7/0100/DPMPTSP-DS/2025  
 Tanggal : 6 Januari 2025

  <b>DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN DELI SERDANG</b>	NOMOR SOP	: SOP/XVIC12/DPMPTSP/2025
	TGL. PEMBUATAN	: 6 Januari 2025
	TGL. REVISI	:
	TGL. EFEKTIF	: 6 Januari 2025
	DISAHKAN OLEH	:   Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Deli Serdang Drs. Hendra Wijaya Pembina Utama Muda NIP. 19661213 199010 1 002
	NAMA SOP	: Standar Operasional Prosedur Pelayanan dan Penggunaan Bagian-Bagian Jalan Kabupaten Deli Serdang
<b>DASAR HUKUM:</b>	<b>KUALIFIKASI PELAKSANA:</b>	
1 Undang-Undang nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik	1 Memahami dasar hukum dan persyaratan perizinan	
2 Undang-undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti undang-undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi undang-undang.	2 Mampu mengoperasikan Komputer	
3 Peraturan Pemerintah RI Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah	3 Mampu berkomunikasi dengan baik	
4 Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko	4 Memiliki sikap tepercaya, disiplin dan jujur	
5 Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 20/PRT/M/2010 tentang Pedoman Pemanfaatan dan Penggunaan Bagian-Bagian Jalan		
6 Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2012 Tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan		
7 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah		
8 Peraturan Bupati Deli Serdang Nomor 56 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko di Kabupaten Deli Serdang		
9 Peraturan Bupati Deli Serdang Nomor 1 Tahun 2025 Tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur		
<b>KETERKAITAN:</b>	<b>PERALATAN/PERLENGKAPAN:</b>	
	1 Komputer	
	2 Printer	
	3 ATK	
	4 Aplikasi OSS - RBA	
<b>PERINGATAN:</b>	<b>PENCATATAN DAN PENDATAAN:</b>	
Apabila SOP tidak dijalankan dengan baik dan benar maka penerbitan izin tidak akan sesuai dengan waktu yang telah ditentukan	1 Berkas Permohonan	
	2 Surat Perintah Tinjau Lapangan dan Pemberitahuan Penolakan	





Lampiran XIII : Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Deli Serdang tentang Standar Operasional Prosedur Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko melalui OSS-RBA Kabupaten Deli Serdang  
 Nomor : 500.16.7/0100/DPMPSTP-DS/2025  
 Tanggal : 6 Januari 2025

  <b>DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN DELI SERDANG</b>	NOMOR SOP	: SOP/XV/C13/DPMPSTP/2025
	TGL. PEMBUATAN	: 6 Januari 2025
	TGL. REVISI	:
	TGL. EFEKTIF	: 6 Januari 2025
	DISAHKAN OLEH	: <div style="text-align: center;">                   Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Deli Serdang                  Drs. Hendra Wijaya                  Pembina Utama Muda                  NIP. 19691213 199010 1 002             </div>
	NAMA SOP	: Pelayanan Berusaha Berbasis Risiko Badan Usaha (SBU) konstruksi
<b>DASAR HUKUM:</b>	<b>KUALIFIKASI PELAKSANA:</b>	
1 Undang-Undang nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik	1 Memahami dasar hukum dan persyaratan perizinan	
2 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2021 tentang Jasa Konstruksi		
3 Undang-undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti undang-undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi undang-undang.	2 Mampu mengoperasikan Komputer	
4 Peraturan Pemerintah Nomor 92 tahun 2010 tentang Usaha dan Peran Masyarakat Jasa Konstruksi	3 Mampu berkomunikasi dengan baik	
5 Peraturan Pemerintah RI Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah	4 Memiliki sikap teliti, disiplin dan jujur	
6 Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko		
7 Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 8 Tahun 2025 tentang standar kegiatan usaha dan/atau standar produk/jasa, pelaksanaan pengawasan, dan penanganan sanksi pada penyelenggaraan perizinan berusaha berbasis risiko sektor pekerjaan umum		
8 Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 8 Tahun 2025 tentang Tata cara pelaksanaan pemenuhan sertifikat standar jasa konstruksi dalam rangka mendukung kemudahan perizinan berusaha bagi pelaku usaha jasa konstruksi		
9 Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2012 Tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan		
10 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah		
11 Peraturan Bupati Deli Serdang Nomor 56 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko di Kabupaten Deli Serdang		
12 Peraturan Bupati Deli Serdang Nomor 1 Tahun 2025 Tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur		
<b>KETERKAITAN:</b>	<b>PERALATAN/PERLENGKAPAN:</b>	
1 SOP Sertifikat Standar Badan Usaha / SBU	1 Komputer	
	2 Printer	
	3 ATK	
	4 Aplikasi OSS - RBA	
<b>PERINGATAN:</b>	<b>PENCATATAN DAN PENDATAAN:</b>	
Apabila SOP tidak dijalankan dengan baik dan benar maka penerbitan izin tidak akan sesuai dengan waktu yang telah ditentukan	1 Berkas Permohonan	
	2 Surat Perintah Tinjau Lapangan dan Pemberitahuan Penolakan	



Lampiran XIV : Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Deli Serdang tentang Standar Operasional Prosedur Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko melalui OSS-RBA Kabupaten Deli Serdang  
 Nomor : 500.16.7/0100/DPMPTSP-DS/2025  
 Tanggal : 6 Januari 2025

  <b>DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN DELI SERDANG</b>	NOMOR SOP	: SOP/XVC14/DPMPTSP/2025
	TGL. PEMBUATAN	: 6 Januari 2025
	TGL. REVISI	:
	TGL. EFEKTIF	: 6 Januari 2025
	DISAHKAN OLEH	: <div style="text-align: right;">           Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Deli Serdang  <b>Dr. Hendra Wijaya</b>          Pembina Utama Muda          NIP. 19691213 199010 1 002       </div>
	NAMA SOP	: Rekomendasi Sertifikat Standar / Izin Peternakan
<b>DASAR HUKUM:</b>	<b>KUALIFIKASI PELAKSANA:</b>	
1 Undang-Undang nomor 8 tahun 1999 tentang perlindungan konsumen	1 Memahami dasar hukum dan persyaratan perizinan	
2 Undang-Undang nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik	2 Mampu mengoperasikan Komputer	
3 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan	3 Mampu berkomunikasi dengan baik	
4 Undang-undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti undang-undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi undang-undang	4 Memiliki sikap telis, disiplin dan jujur	
5 Undang-undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti undang-undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi undang-undang		
6 Peraturan Pemerintah RI Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah		
7 Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko		
8 Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2012 Tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan		
9 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah		
10 Permentan Nomor 15 Tahun 2021 tentang Standart Kegiatan Usaha dan Standart Produk pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Pertanian (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 262)		
11 Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2025 Tentang Standar Kegiatan Usaha dan/atau Standar Produk dan Jasa pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Pertanian		
12 Peraturan Bupati Deli Serdang Nomor 56 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko di Kabupaten Deli Serdang		
13 Peraturan Bupati Deli Serdang Nomor 1 Tahun 2025 Tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur		
<b>KETERKAITAN:</b>	<b>PERALATAN/PERLENGKAPAN:</b>	
1 SOP Alur Penerbitan Rekomendasi Izin Usaha Peternakan	1 Komputer	
	2 Printer	
	3 ATK	
	4 Aplikasi OSS - RBA	
<b>PERINGATAN:</b>	<b>PENCATATAN DAN PENDATAAN:</b>	
Apabila SOP tidak dijalankan dengan baik dan benar maka penerbitan izin tidak akan sesuai dengan waktu yang telah ditentukan	1 Berkas Permohonan	
	2 Surat Perintah Tinjau Lapangan dan Pembertitahuan Penolakan	
	3 Riwayat Pelunasan PBB	



Lampiran XV : Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Deli Serdang tentang Standar Operasional Prosedur Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko melalui OSS-RBA Kabupaten Deli Serdang  
 Nomor : 500.16.7/0100/DPMPTSP-DS/2025  
 Tanggal : 6 Januari 2025

  <b>DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN DELI SERDANG</b>	NOMOR SOP	: SOP/XVIC15/DPMPTSP/2025
	TGL PEMBUATAN	: 6 Januari 2025
	TGL REVISI	:
	TGL EFEKTIF	: 6 Januari 2025
	DISAHKAN OLEH	
NAMA SOP		Penetapan Standar Perkebunan
<b>DASAR HUKUM:</b>		<b>KUALIFIKASI PELAKSANA:</b>
1	Undang-Undang nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik	1 Memahami dasar hukum dan persyaratan perizinan
2	Undang-undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti undang-undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi undang-undang.	2 Mampu mengoperasikan Komputer
3	Peraturan Pemerintah RI Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah	3 Mampu berkomunikasi dengan baik
4	Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Usaha Perkebunan	4 Memiliki sikap teliti, disiplin dan jujur
5	Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko	
6	Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2012 Tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan	
7	Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 21/Permentan/Kb.410/6/2017 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Pertanian Nomor 98/Permentan/OT.140/9/2013 Tentang Pedoman Perizinan Usaha Perkebunan	
8	Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah	
9	Peraturan Daerah Kabupaten Deli Serdang Nomor 1 Tahun 2021 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Deli Serdang Tahun 2021-2041	
10	Peraturan Bupati Deli Serdang Nomor 56 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko di Kabupaten Deli Serdang	
11	Peraturan Bupati Deli Serdang Nomor 1 Tahun 2025 Tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur	
<b>KETERKAITAN:</b>		<b>PERALATAN/PERLENGKAPAN:</b>
1	SOP Rekomendasi Sertifikat Standar Usaha Perkebunan	1 Komputer 2 Printer 3 ATK 4 Aplikasi OSS - RBA
<b>PERINGATAN:</b>		<b>PENCATATAN DAN PENDATAAN:</b>
Apabila SOP tidak dijalankan dengan baik dan benar maka penerbitan izin tidak akan sesuai dengan waktu yang telah ditentukan		1 Berkas Permohonan 2 Surat Perintah Tinjau Lapangan dan Pemberitahuan Penolakan



Lampiran XVI : Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Deli Serdang tentang Standar Operasional Prosedur Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko melalui OSS-RBA Kabupaten Deli Serdang  
 Nomor : 500.16.7/0100/DPMPTSP-DS/2025  
 Tanggal : 6 Januari 2025

  <b>DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN DELI SERDANG</b>	NOMOR SOP	: SCP/XVIC16/DPMPTSP/2025
	TGL. PEMBUATAN	: 6 Januari 2025
	TGL. REVISI	:
	TGL. EFEKTIF	: 6 Januari 2025
	DISAHKAN OLEH	: <div style="text-align: right;">             Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Deli Serdang            Drs. Hendra Wijaya            Pembina Utama Muda            NIP. 19631213 199010 1 002         </div>
NAMA SOP		Perizinan Berusaha Standar Pelatihan Kerja Swasta
<b>DASAR HUKUM:</b>		<b>KUALIFIKASI PELAKSANA:</b>
1	Undang-Undang nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik	1 Memahami dasar hukum dan persyaratan perizinan
2	Undang-undang Nomor 8 Tahun 2023 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti undang-undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi undang-undang	2 Mampu mengoperasikan Komputer
3	Peraturan Pemerintah RI Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah	3 Mampu berkomunikasi dengan baik
4	Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko	4 Memiliki sikap teliti, disiplin dan jujur
5	Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2012 Tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan	
6	Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah	
7	Peraturan menteri ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2025 Tentang standar kegiatan usaha dan standar produk/jasa pada penyelenggaraan perizinan berusaha berbasis risiko Sektor ketenagakerjaan	
8	Peraturan Bupati Deli Serdang Nomor 56 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko di Kabupaten Deli Serdang	
9	Peraturan Bupati Deli Serdang Nomor 1 Tahun 2025 Tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur	
<b>KETERKAITAN:</b>		<b>PERALATAN/PERLENGKAPAN:</b>
1	SOP Pelayanan Pemberian Rekomendasi Bagi Lembaga Pelatihan Kerja Swasta (LPKS)	1 Komputer 2 Printer 3 ATK 4 Aplikasi OSS - RBA
<b>PERINGATAN:</b>		<b>PENCATATAN DAN PENDATAAN:</b>
Apabila SOP tidak dijalankan dengan baik dan benar maka penerbitan izin tidak akan sesuai dengan waktu yang telah ditentukan		1 Berkas Permohonan 2 Surat Perintah Tinjau Lapangan dan Pemberitahuan Penolakan 3 Riwayat Pelunasan PBB



Lampiran XVII : Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Deli Serdang tentang Standar Operasional Prosedur Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko melalui OSS-RBA Kabupaten Deli Serdang  
 Nomor : 500.16.7/0100/DPMP-TSP-DS/2025  
 Tanggal : 6 Januari 2025

  <b>DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN DELI SERDANG</b>	NOMOR SOP	: SOP/XV/C17/DPMP-TSP/2025
	TGL. PEMBUATAN	: 6 Januari 2025
	TGL. REVISI	:
	TGL. EFEKTIF	: 6 Januari 2025
	DISAHKAN OLEH	  Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Deli Serdang Drs. Hendri Wijaya Pembina Utama Muda NIP.19691213 199010 1 002
	NAMA SOP	Penelitian Persetujuan Lingkungan
<b>DASAR HUKUM:</b>	<b>KUALIFIKASI PELAKSANA:</b>	
1 Undang-Undang nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik	1 Memahami dasar hukum dan persyaratan penzinan	
2 Undang-undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti undang-undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi undang-undang	2 Mampu mengoperasikan Komputer	
3 Peraturan Pemerintah RI Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah	3 Mampu berkomunikasi dengan baik	
4 Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	4 Memiliki sikap tertib, disiplin dan jujur	
5 Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko		
6 Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2012 Tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan		
7 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah		
8 Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 4 Tahun 2021 tentang Daftar Usaha Dan/Atau Kegiatan Yang Wajib Memiliki Analisa Mengenai Dampak Lingkungan Hidup, Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup Atau Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan Dan Pemantauan Lingkungan Hidup		
9 Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 5 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penerbitan Persetujuan Teknis dan Surat Kelayakan Operasional Bidang Pengendalian Pencemaran Lingkungan.		
10 Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 6 Tahun 2021 tentang Tata Cara dan Persyaratan Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun.		
11 Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 11 Tahun 2025 tentang Baku Mutu Air Limbah Domestik Dan Standar Teknologi Pengolahan Air Limbah Domestik.		
12 Peraturan Bupati Deli Serdang Nomor 58 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko di Kabupaten Deli Serdang		
13 Peraturan Bupati Deli Serdang Nomor 1 Tahun 2025 Tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur		
<b>KETERKAITAN:</b>	<b>PERALATAN/PERLENGKAPAN:</b>	
1 SOP Pelayanan Pemberian Rekomendasi Bagi Lembaga Pelatihan Kerja Swasta (LPKS)	1 Komputer 2 Printer 3 ATK 4 Aplikasi OSS - RBA	
<b>PERINGATAN:</b>	<b>PENCATATAN DAN PENDATAAN:</b>	
Apabila SOP tidak dijalankan dengan baik dan benar maka penerbitan izin tidak akan sesuai dengan waktu yang telah ditentukan	1 Berkas Permohonan 2 Surat Perintah Tinjau Lapangan dan Pemberitahuan Penolskan 3 Riwayat Pelunasan PBB	

PENERBITAN PERSETUJUAN LINGKUNGAN

No	Kegiatan	Pelaksana					Mutu Baku			Keterangan	
		Pemrakarsa	OSS	Amdalnet	Validator Administrasi dan Substansi Amdalnet	Kepala Bidang Tata Lingkungan	Kepala Dinas Lingkungan Hidup	Kelengkapan	Waktu		Output
1	Melakukan Penapisan Usaha dan/atau Kegiatan yaitu Login Amdalnet dengan akun OSS, memilih tingkat resiko rencana kegiatan, dan melengkapi data usaha serta pemenuhan persyaratan							Akun OSS Pemrakarsa (Nama Kegiatan Usaha, Deskripsi Kegiatan, Deskripsi Lokasi, Dokumen Kesesuaian Tata Ruang, Surat Pernyataan, Peta Tapak Proyek (PDF), Peta Tapak Proyek (SHP), Surat Pengecualian PIPPIB, dan Surat Pengecualian Kawasan Lindung) serta Dokumen Lingkungan Hidup (Amdal dalam Formulir Kerangka Acuan atau UKL-UPL)		Hasil Penapisan Otomatis Sistem Informasi Dokumen Lingkungan Hidup Amdalnet serta Submit Dokumen Lingkungan Hidup (Amdal dalam Formulir Kerangka Acuan atau UKL-UPL)	
2	Uji Berkas Administrasi dan Validasi, Undangan, Berita Acara dan Pengisian SPT Rapat Pemeriksaan (Amdal dalam Formulir Kerangka Acuan atau UKL-UPL)		Tidak					Persyaratan Dokumen Lingkungan Hidup (Amdal dalam Formulir Kerangka Acuan atau UKL-UPL), Berita Acara Validasi Berkas, Jadwal Rapat dan Link Zoom Meeting	2 Hari	Undangan Rapat dan Berita Acara Validasi Berkas	
3	Menyusun Dokumen Amdal RKL-RPL dan Submit Dokumen Kegiatan				Ya			Dokumen Lingkungan Hidup (Amdal RKL-RPL)	90 Hari	Dokumen Lingkungan Hidup (Amdal RKL-RPL)	
4	Uji Berkas Administrasi dan Validasi, Undangan, Berita Acara dan Pengisian SPT Rapat Pemeriksaan (Amdal RKL-RPL)			Tidak		Ya		Persyaratan Dokumen Lingkungan Hidup (Amdal RKL-RPL), Berita Acara Validasi Berkas, Jadwal Rapat dan Link Zoom Meeting	1 Hari	Undangan Rapat, Berita Acara Validasi Berkas dan Rincian Pelaksanaan PDB	
5	Submit Perbaikan Dokumen							Perbaikan Dokumen Lingkungan	5 Hari	Submit Perbaikan Dokumen Lingkungan	
6	Uji Substansi Dokumen dan Penerbitan Persetujuan Lingkungan							Perbaikan Dokumen Lingkungan, Nota Dinas Persetujuan Lingkungan, Risalah Pengolahan Data, Draft Persetujuan Lingkungan	1 Hari	Persetujuan Lingkungan	
7	Mengunduh Persetujuan Lingkungan							Persetujuan Lingkungan	60 Menit	Persetujuan Lingkungan	

Lampiran XVIII : Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Deli Serdang tentang Standar Operasional Prosedur Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko melalui OSS-RBA Kabupaten Deli Serdang  
 Nomor : 500.16.7/0100/DPMPSTP-DS/2025  
 Tanggal : 6 Januari 2025



**DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN DELI SERDANG**

NOMOR SOP	: SOP/XV/C18/DPMPSTP/2025
TGL. PEMBUATAN	: 6 Januari 2025
TGL. REVISI	:
TGL. EFEKTIF	: 6 Januari 2025
DISAHKAN OLEH	: <div style="text-align: center;">  <p>Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Deli Serdang          Des. Hendra Wijaya          Pembina Utama Muda          NIP. 19691213 199010 1 002</p> </div>
NAMA SOP	: Perizinan Izin Penyelenggaraan Fasilitas Parkir
<b>DASAR HUKUM:</b>	<b>KUALIFIKASI PELAKSANA:</b>
1 Undang-Undang nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik	1 Memahami dasar hukum dan persyaratan perizinan
2 Undang-undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti undang-undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi undang-undang.	2 Mampu mengoperasikan Komputer
3 Peraturan Pemerintah RI Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah	3 Mampu berkomunikasi dengan baik
4 Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko	4 Memiliki sikap teliti, disiplin dan jujur
5 Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2012 Tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan	
6 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah	
7 Peraturan Daerah Kabupaten Deli Serdang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah	
8 Peraturan Bupati Deli Serdang Nomor 56 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko di Kabupaten Deli Serdang	
9 Peraturan Bupati Deli Serdang Nomor 1 Tahun 2025 Tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur	
<b>KETERKAITAN:</b>	<b>PERALATAN/PERLENGKAPAN:</b>
1 SOP Verifikasi Persetujuan Izin Penyelenggaraan Fasilitas Parkir	1 Komputer 2 Printer 3 ATK 4 Aplikasi OSS - RBA
<b>PERINGATAN:</b>	<b>PENCATATAN DAN PENDATAAN:</b>
Apabila SOP tidak dijalankan dengan baik dan benar maka penerbitan izin tidak akan sesuai dengan waktu yang telah ditentukan	1 Berkas Permohonan 2 Surat Perintah Tinjau Lapangan dan Pemberitahuan Penolakan 3 Riwayat Pelunasan PBB

Penerbitan Izin Penyelenggaraan Fasilitas Parkir

No	Kegiatan	Pelaksana						Mutu Baku			Keterangan	
		Pemohon	Sistem OSS	Admin	Kepala Sekel Perparkiran	Kepala Bidang Sarana dan Prasarana	Kepala Bidang Perizinan	Kepala Dinas PTSP	Kelengkapan	Waktu		Output
1	Melakukan pendaftaran akun pada aplikasi OSS, mengisi data usaha dan Pemenuhan Persyaratan (Kegiatan Usaha, Luas Lahan Usaha, Alamat Usaha, Nama Usaha/Kegiatan dan Modal Usaha)								KTP, NPWP, No WA/ Email dan Data Usaha		Akuan	
2	Melengkapi persyaratan		Tidak		Ya				Dokumen Persyaratan		Notifikasi Pendaftaran	
3	Memverifikasi Persyaratan, Melaksanakan survei Lapangan, membuat laporan dan memberikan hasil survei								Data Persyaratan	3 Hari	Surat Perintah Tugas	
4	Memvalidasi hasil Survei					Ya			Surat Perintah Tugas dan Data Persyaratan	60 Menit	Berita Acara dan Riwayat Pelaksanaan PBE	
5	Mengupload Lampiran Izin ke sistem OSS								Draft Lampiran Izin	30 Menit	Rekomendasi dan Lampiran Izin	
6	Memvalidasi Hasil Rekomendasi					Tidak		Ya	Rekomendasi dan Lampiran Izin	30 Menit	Lampiran Izin	
7	Menyetujui / Menolak Izin Penyelenggaraan Fasilitas Parkir								Draft Izin	30 Menit	Draft Izin	
8	Mengunduh Izin								Draft	60 Menit	Izin	

Lampiran XIX : Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Deli Serdang tentang Standar Operasional Prosedur Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko melalui OSS-RBA Kabupaten Deli Serdang  
 Nomor : 500.16.7/0100/DPMPTSP-DS/2025  
 Tanggal : 6 Januari 2025



**DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN DELI SERDANG**

NOMOR SOP	: SOP/XVIC19/DPMPTSP/2025
TGL. PEMBUATAN	: 6 Januari 2025
TGL. REVISI	:
TGL. EFEKTIF	: 6 Januari 2025
DISAHKAN OLEH	:  Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Deli Serdang Drs. Hendra Wijaya Pembina Utama Muda NIP. 19691213 199010 1 002
NAMA SOP	: Penerbitan Izin Angkutan Perdesaan Bukan Bus, Dalam Trayek
<b>DASAR HUKUM:</b>	<b>KUALIFIKASI PELAKSANA:</b>
1 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan	1 Memahami dasar hukum dan persyaratan perizinan
2 Undang-Undang nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik	2 Mampu mengoperasikan Komputer
3 Undang-undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti undang-undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi undang-undang.	3 Mampu berkomunikasi dengan baik
4 Peraturan Pemerintah RI Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah	4 Memiliki sikap teliti, disiplin dan jujur
5 Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko	
6 Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2012 Tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan	
7 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah	
8 Pemenhub Nomor 1 Tahun 2026 tentang Standar kegiatan usah dan/atau standart produk/jasa pada penyelenggaraan perizinan berusaha berbasis resiko sektor transportasi	
9 Peraturan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Deli Serdang Nomor 56 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko di Kabupaten Deli Serdang	
10 Peraturan Daerah Kabupaten Deli Serdang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah	
11 Peraturan Bupati Deli Serdang Nomor 1 Tahun 2025 Tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur	
<b>KETERKAITAN:</b>	<b>PERALATAN/PERLENGKAPAN:</b>
1 SOP Verifikasi Sertifikat Standart Angkutan Perdesaan Bukan Bus, Dalam Trayek	1 Komputer 2 Printer 3 ATK 4 Aplikasi OSS - RBA
<b>PERINGATAN:</b>	<b>PENCATATAN DAN PENDATAAN:</b>
Apabila SOP tidak dijalankan dengan baik dan benar maka penerbitan izin tidak akan sesuai dengan waktu yang telah ditentukan	1 Berkas Permohonan 2 Surat Perintah Tinjau Lapangan dan Pembertitahuan Penolakan 3 Riwayat Pelunasan PBB





Lampiran XX : Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Deli Serdang tentang Standar Operasional Prosedur Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko melalui OSS-RBA Kabupaten Deli Serdang  
 Nomor : 500.16.7/0100/DPMPSTP-DS/2025  
 Tanggal : 6 Januari 2025

  <b>DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN DELI SERDANG</b>	NOMOR SOP	: SOP/XVIC20/DPMPSTP/2025
	TGL. PEMBUATAN	: 6 Januari 2025
	TGL. REVISI	:
	TGL. EFEKTIF	: 6 Januari 2025
	DISAHKAN OLEH	: <div style="text-align: right;">           Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Deli Serdang             Drs. Hendra Wijaya          Pembina Utama Muda          NIP. 19691213 199010 1 002       </div>
	NAMA SOP	: Keputusan Dinas PSAT Produk dalam Negeri Usaha Kecil (PSAT-PUK)
<b>DASAR HUKUM:</b>		<b>KUALIFIKASI PELAKSANA:</b>
1	Undang-Undang nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik	1 Memahami dasar hukum dan persyaratan perizinan
2	Undang-undang Nomor. 18 Tahun 2012 tentang Pangan	2 Mampu mengoperasikan Komputer
3	Undang-undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti undang-undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi undang-undang	3 Mampu berkomunikasi dengan baik
4	Peraturan Pemerintah Nomor 86 Tahun 2019 tentang Keamanan Pangan	4 Memiliki sikap teliti, disiplin dan jujur
5	Peraturan Pemerintah RI Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah	
6	Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko	
7	Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2012 Tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan	
8	Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah	
9	Peraturan Badan Pangan Nasional Nomor 10 Tahun 2025 Tentang Standar Produk pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sub Sektor Pangan Segar	
10	Peraturan Bupati Deli Serdang Nomor 56 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko di Kabupaten Deli Serdang	
11	Peraturan Bupati Deli Serdang Nomor 1 Tahun 2025 Tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur	
<b>KETERKAITAN:</b>		<b>PERALATAN/PERLENGKAPAN:</b>
1	SOP Verifikasi Registrasi Pangan Segar Asal Tumbuhan Produksi Dalam Negeri Usaha Kecil	1 Komputer 2 Printer 3 ATK 4 Aplikasi OSS - RBA
<b>PERINGATAN:</b>		<b>PENCATATAN DAN PENDATAAN:</b>
Apabila SOP tidak dijalankan dengan baik dan benar maka penerbitan izin tidak akan sesuai dengan waktu yang telah ditentukan		1 Berkas Permohonan 2 Surat Perintah Tinjau Lapangan dan Pemberitahuan Penolakan 3 Riwayat Pelunasan PBB



Lampiran XXI : Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Deli Serdang tentang Standar Operasional Prosedur Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko melalui OSS-RBA Kabupaten Deli Serdang  
 Nomor : 500.16.7/0100/DPMPSTP-DS/2025  
 Tanggal : 6 Januari 2025

  <b>DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN DELI SERDANG</b>	NOMOR SOP	: SOP/XV/C21/DPMPSTP/2025
	TGL PEMBUATAN	: 6 Januari 2025
	TGL REVISI	:
	TGL EFEKTIF	: 6 Januari 2025
	DISAHKAN OLEH	: <div style="text-align: center;">   <b>Dr. Hendra Wijaya</b>          Pembina Utama Muda          NIP. 19691213 199010 1 002       </div>
	NAMA SOP	: Penerbitan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (KKPR)
<b>DASAR HUKUM:</b>		<b>KUALIFIKASI PELAKSANA:</b>
1	Undang-Undang nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik	1 Memahami dasar hukum dan persyaratan perizinan
2	Undang-undang Nomor 8 Tahun 2023 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti undang-undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi undang-undang.	2 Mampu mengoperasikan Komputer
3	Peraturan Pemerintah RI Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah	3 Mampu berkomunikasi dengan baik
4	Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko	4 Memiliki sikap teliti, disiplin dan jujur
5	Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2012 Tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan	
6	Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah	
7	Peraturan Menteri ATR/BPN Nomor 13 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (KKPR) dan Sinkronisasi Program Pemanfaatan Ruang	
8	Peraturan Daerah Kabupaten Deli Serdang Nomor 1 Tahun 2021 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Deli Serdang Tahun 2021-2041	
9	Peraturan Bupati Deli Serdang Nomor 56 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko di Kabupaten Deli Serdang	
10	Peraturan Bupati Deli Serdang Nomor 1 Tahun 2025 Tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur	
<b>KETERKAITAN:</b>		<b>PERALATAN/PERLENGKAPAN:</b>
1	SOP Verifikasi Registrasi Pangan Segar Asal Tumbuhan Produksi Dalam Negeri Usaha Kecil	1 Komputer 2 Printer 3 ATK 4 Aplikasi OSS - RBA
<b>PERINGATAN:</b>		<b>PENCATATAN DAN PENDATAAN:</b>
Apabila SOP tidak dijalankan dengan baik dan benar maka penerbitan izin tidak akan sesuai dengan waktu yang telah ditentukan		1 Berkas Permohonan 2 Surat Perintah Tirjau Lapangan dan Pemberitahuan Penolakan 3 Riwayat Pelunasan PBB



Lampiran XXII : Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Deli Serdang tentang Standar Operasional Prosedur Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko melalui OSS-RBA Kabupaten Deli Serdang  
 Nomor : 500.16.7/0100/DPMPTSP-DS/2025  
 Tanggal : 6 Januari 2025



**DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN DELI SERDANG**

NOMOR SOP	: SOP/XVIC22/DPMPTSP/2025
TGL. PEMBUATAN	: 6 Januari 2025
TGL. REVISI	:
TGL. EFEKTIF	: 6 Januari 2025
DISAHKAN OLEH	: <div style="text-align: center;"> </div>
NAMA SOP	: <div style="text-align: center;"> </div> Perencanaan Pertimbangan Teknis Pertanahan dalam Rangka Penerbitan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (KKPR)
<b>DASAR HUKUM:</b>	<b>KUALIFIKASI PELAKSANA:</b>
1 Undang-Undang nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik	1 Memahami dasar hukum dan persyaratan penzinan
2 Undang-undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti undang-undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi undang-undang.	2 Mampu mengoperasikan Komputer
3 Peraturan Pemerintah RI Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah	3 Mampu berkomunikasi dengan baik
4 Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko	4 Memiliki sikap teliti, disiplin dan jujur
5 Peraturan Menteri ATR/BPN Nomor 12 Tahun 2021 tentang Pertimbangan Teknis Pertanahan	
6 Peraturan Menteri ATR/BPN Nomor 13 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (KKPR) dan Sinkronisasi Program Pemanfaatan Ruang	
7 Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2012 Tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan	
8 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah	
9 Peraturan Bupati Deli Serdang Nomor 56 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko di Kabupaten Deli Serdang	
10 Peraturan Bupati Deli Serdang Nomor 1 Tahun 2025 Tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur	
<b>KETERKAITAN:</b>	<b>PERALATAN/PERLENGKAPAN:</b>
1 SOP Pertimbangan Teknis Pertanahan dalam Rangka Penerbitan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (KKPR) Melalui OSS	1 Komputer 2 Printer 3 ATK 4 Aplikasi OSS - RBA
<b>PERINGATAN:</b>	<b>PENCATATAN DAN PENDATAAN:</b>
Apabila SOP tidak dijalankan dengan baik dan benar maka penerbitan izin tidak akan sesuai dengan waktu yang telah ditentukan	1 Berkas Permohonan 2 Surat Perintah Tinjau Lapangan dan Pemberitahuan Penolakan 3 Riwayat Pelunasan PBB

**Pertimbangan Teknis Pertanahan dalam Rangka Penerbitan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (KKPR) melalui OSS pada Kantor Pertanahan Kabupaten Deli Serdang**

No.	Kegiatan	Pelaksana				Mutu Baku			Keterangan	
		Pemohon	Sistem OSS	Sistem KKP	Tim PTP	Kepala Kantor Pertanahan	Kelengkapan	Waktu		Output
1	Mengajukan Permohonan ke Kantor Pertanahan Kabupaten Deli Serdang (Penerimaan Berkas Permohonan dan Pemeriksaan Berkas Permohonan)						- Berkas Permohonan	1 Hari	- Tanda Terima Dokumen	
2	Melaksanakan Peninjauan Lapangan (Penyiapan Surat Tugas dan Persiapan Teknis yang meliputi Penyiapan Data Spasial, Plotting Lokasi yang dimohon, Pembuatan Peta Kerja, serta Penyiapan Alat Lapangan)					- Surat Tugas Peninjauan Lapangan - Berkas Permohonan - Peta kerja - Alat Lapangan	3 Hari	- Catatan Lapangan - Berita Acara Peninjauan Lapangan		
3	Mengolah dan Menganalisis Data (Analisis Ketersediaan Tanah dan Analisis Kemampuan Tanah)					- Surat Tugas Pengolahan Data - Berkas Permohonan - Catatan Lapangan - Berita Acara Peninjauan Lapangan - Data Pendukung (tekstual dan spasial)	2 Hari	- Peta Analisis Data		
4	Melaksanakan Rapat Pembahasan dan Kontrol Kualitas					- Undangan Rapat Tim PTP - Berkas Permohonan - Peta Analisis Data	1 Hari	- Berita Acara Rapat Pembahasan		
5	Menyusun Risalah dan Peta					- Berita Acara Rapat Pembahasan - Berkas Permohonan - Konsep Risalah PTP - Lampiran Peta Risalah PTP	2 Hari	- Risalah PTP - Peta PTP		
6	Penerbitan dan Penguploadan PTP						- Risalah dan Peta PTP - Berkas Permohonan	1 Hari	Pertimbangan Teknis Pertanahan	Penerbitan PT di-upload melalui KKP-we dan terintegrasi dengan OSS sehingga dapat langsung diunduh pemohon